

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 01/NKB/2008  
01/NKB/DPRD/2008**

**TANGGAL : 29 Januari 2008**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 01/NKB/2008**  
**01/NKB/DPRD/2008**

**TANGGAL : 29 JANUARI 2008**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Nama : H. HERRY ZUDIANTO**

**Jabatan : Walikota Yogyakarta**

**Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho Yogyakarta**  
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili  
Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006, tertanggal 11 Desember 2006  
tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengangkatan Walikota  
Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Pasal 25  
huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  
untuk selanjutnya disebut:-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- 2.a. Nama : ARIF NOOR HARTANTO**  
**Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta**  
**Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**
- b. Nama : ANDRIE SUBIANTORO**  
**Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta**  
**Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**
- c. Nama : DWI BUDI UTOMO**  
**Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta**  
**Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202 Tahun 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2004 – 2009 untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Dengan ini menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor  $\frac{19/NKB/2007}{06/NKB/DPRD/2007}$  tanggal 01 Desember 2007, dalam pembahasan antara Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD telah mengalami perubahan antara lain karena adanya tambahan pendapatan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan dan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, Kegiatan Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem pada Bagian Tata Pemerintahan, tambahan kegiatan Rekrutmen Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat DPRD, pergeseran belanja modal dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Badan Pengelolaan Barang Daerah, tambahan beberapa kegiatan luncuran serta perubahan lainnya pada belanja dan pembiayaan daerah, maka atas dasar sebagaimana tersebut di atas, Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Yogyakarta Nomor  $\frac{19/NKB/2007}{06/NKB/DPRD/2007}$  tanggal 01 Desember 2007, perlu dicabut dan diganti untuk disesuaikan. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2008 dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2008.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan program serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran 2008 sehingga menjadi sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Kota Yogyakarta ini disampaikan kondisi umum yang telah dicapai tahun 2006 dan prediksi 2007. Kondisi umum tersebut dilihat dari aspek-aspek yang terukur meliputi perekonomian daerah, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan.

Kondisi umum perekonomian daerah dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan laju inflasi. Pada indikator pertumbuhan ekonomi<sup>1</sup>, tahun 2006 perekonomian Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 3,96%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya pertumbuhan pada sektor bangunan sebesar 17,57%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,71%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,63%, dan sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 4,67%. Tetapi di sisi lain, pada tahun 2006 juga terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 3,74% serta sektor pertanian sebesar 2,35%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diperkirakan mengalami kenaikan. Pertumbuhan tersebut didasarkan pada tumbuhnya pariwisata pasca gempa menyebabkan tumbuhnya sektor jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan baik milik masyarakat, pemerintah,

---

<sup>1</sup> Sumber : BPS Kota Yogyakarta

sarana prasarana umum, diperkirakan akan menaikkan tumbuhnya sektor bangunan.

Perkembangan PDRB<sup>2</sup> per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2005 dan 2006 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 PDRB perkapita Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 10.109.233,- sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp 10.322.561,- atau mengalami kenaikan sebesar 2,11%.

Laju inflasi<sup>3</sup> pada tahun 2005 sebesar 14,98, yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006 laju inflasi sebesar 10,40 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Besarnya angka inflasi tersebut terutama didorong oleh meningkatnya harga-harga bangunan dan upah tenaga kerja di sektor bangunan.

Penduduk<sup>4</sup> berumur 15 tahun ke atas di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 tercatat 359.201 orang, terdiri dari 175.815 laki-laki dan 183.386 perempuan. Dari jumlah tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama yaitu bekerja, mencari kerja, sekolah dan lainnya.

Pengangguran sampai dengan tahun 2006 tercatat sebanyak 34.441 orang. Pertumbuhan ekonomi kota yang mulai pulih pasca gempa bumi dalam berbagai sektor usaha berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah pengangguran. Pada akhir tahun 2007 diprediksikan turun sebesar 3,62% dibandingkan tahun 2006 atau menjadi 33.194 orang.

Pada sektor kesehatan<sup>5</sup> perilaku hidup sehat merupakan indikator penting yang berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat, belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu indikator perilaku hidup sehat ditunjukkan oleh budaya bersih yang dilihat dari angka bebas jentik minimal 95%, tetapi pada tahun 2006 hasil yang dicapai baru 77,9% dan di akhir tahun 2007 di prediksikan menjadi 85%. Di sisi lain, angka kematian bayi menurun sangat tajam yaitu pada tahun 2006 sebesar 7,62 per 1000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2007 diprediksikan menjadi 3,7 % per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2006 Angka Kematian Ibu melahirkan 61,7 per 100.000 per kelahiran hidup, umur harapan hidup laki-laki sebesar 66,38

---

<sup>2</sup> Sumber : BPS Kota Yogyakarta

<sup>3</sup> Sumber : BPS Kota Yogyakarta

<sup>4</sup> Sumber : BPS Kota Yogyakarta

<sup>5</sup> Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

tahun, umur harapan hidup perempuan sebesar 70,25 tahun, pada tahun 2007 angka kematian ibu melahirkan dan umur harapan hidup diprediksikan sama.

### **Pencapaian Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2007**

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2008 telah dimulai sejak awal tahun 2007 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2008 diperlukan dukungan hasil pembangunan tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007. Hasil pencapaian pembangunan tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007 sebagai berikut :

a. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis), khususnya budaya kraton (Kasultanan Ngayogyakarta) dan budaya Jawa. Pariwisata berbasis budaya yang merupakan bagian dari visi kota Yogyakarta akan senantiasa dikembangkan terus menerus guna meningkatkan kunjungan wisata, akan tetapi pada tahun 2006 jumlah dan lama tinggal wisatawan<sup>6</sup> mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut disebabkan adanya bencana gempa bumi pada pertengahan tahun 2006 dan adanya rasa kekhawatiran atas keamanan saat berkunjung di Indonesia yang juga berimbas pada Kota Yogyakarta, terutama bagi wisatawan asing. Jumlah kunjungan wisata di obyek-obyek wisata di kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 715.210 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 654.502 orang, dan wisatawan mancanegara sebanyak 60.708 orang, dengan

---

<sup>6</sup> Sumber : Dinas Parnsribud Kota Yogyakarta

lama tinggal rata-rata 1,38 hari. Untuk mengembangkan kepariwisataan diperlukan konsepsi dan sinergi pada masing-masing *stakeholder*. Dari sisi konsepsi, dengan berbagai sumber daya yang relatif lebih baik, Kota Yogyakarta sudah memiliki berbagai konsep yang komprehensif dan didukung oleh *stakeholder* pariwisata. Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2006, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat diperkirakan kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang berkunjung di obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta diperkirakan akan ada peningkatan menjadi 1.072.168 orang baik wisatawan nusantara dan mancanegara, dengan lama tinggal rata-rata 2 (dua) hari.

b. Pendidikan Berkualitas

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan secara normatif mempunyai daya tampung yang cukup bagi warga Kota Yogyakarta untuk semua jenjang pendidikan tetapi pada kegiatan belajar mengajar di sebagian sekolah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kualitas sarana dan prasarana masih kurang memadai. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada lima ukuran/indikator, yaitu

- (1) mutu produk/lulusan,
- (2) mutu proses pembelajaran,
- (3) mutu layanan sekolah,
- (4) mutu lingkungan sekolah, dan
- (5) kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (*life skills*).

Mutu produk/lulusan pendidikan dapat dinilai berdasarkan nilai ujian akhir yang tertinggi dan nilai rata-rata. Pada tahun 2007 nilai Ujian Sekolah Daerah (Usekda) tingkat SD tertinggi 28,6 dengan nilai rata-rata 19,54. Tahun 2007 nilai ujian nasional SMP tertinggi 29,8 dengan nilai rata-rata 23,25. Sedangkan pada tingkat SMA nilai tertinggi ujian nasional SMA IPA 29,4 dengan nilai rata-rata 24,14, SMA IPS 28,55

dengan nilai rata-rata 21,79, dan SMA Bahasa 28,8 dengan nilai rata-rata 23,75 serta nilai ujian nasional untuk SMK tertinggi 38,17 dengan rata-rata 27,66. Angka Partisipasi Murni tahun 2007 untuk SD adalah 123,45%, SMP 95,8%, SMA/K 86,57%, sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk tahun yang sama SD 142,91%, SMP 125,74% dan SMA/K 118,43%. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD 99,95%, tingkat SMP 99,82%, tingkat SMA/SMK 99,08%. Nilai bukan satu-satunya ukuran, harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga mempunyai *life skills* yang dapat dimanfaatkan untuk bekal hidup peserta didik di masyarakat.

Mutu proses pembelajaran sangat ditentukan pada profesionalisme guru. Guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata tetapi juga mendidik, mengarahkan dan menggerakkan siswa agar menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Sampai dengan triwulan III tahun 2007 jumlah guru yang tersertifikasi ada 319 orang yang terdiri dari guru TK 35 orang, SD/MI 101 orang, SMP 64 orang, SMA 67 orang dan SMK sebanyak 52 orang. Mutu layanan sekolah yang baik tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah dan lain sebagainya. Mutu layanan juga ditentukan dari kemampuan pelaku sekolah untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh *stakeholder* sekolah.

Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sekolah yang bersih, indah dan damai, dengan lingkungan yang baik akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Sekolah Standar Nasional (SSN) pada jenjang SMP di Kota Yogyakarta ada 14 sekolah yang terdiri dari 12 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. SMA dengan kategori Sekolah Berstandar Internasional (SBI) ada 4 sekolah, kategori rintisan SBI ada 4 sekolah, sekolah kategori mandiri ada 11 sekolah. SMK Berstandar Manajemen Internasional ada



4 (empat) sekolah. Berdasarkan kondisi tersebut pemerataan kualitas pendidikan perlu ditangani secara intensif dan berkesinambungan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Untuk mendukung pendidikan anak usia dini mulai dirintis penyelenggaraan PAUD di beberapa RW. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat pada tahun 2007 diharapkan pemerataan kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Pada tahun 2006 jumlah anak putus sekolah<sup>7</sup> sebanyak 349 siswa dan pada tahun 2007 diprediksikan menurun menjadi 342 siswa termasuk siswa pindah sekolah keluar daerah sebanyak 56 siswa, sehingga jumlah anak putus sekolah sebanyak 286 siswa.
- (2) Pada tahun 2007 melalui program sertifikasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas guru meningkat 18%.
- (3) Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2006 sebesar 99,6% dan pada tahun 2007 diprediksikan naik menjadi sebesar 99,7%.
- (4) Pada tahun 2006 cakupan pemberian jaminan pendidikan daerah sudah mencapai 99% dari anak sekolah yang tidak mampu. Sedangkan dari sisi komponen standar biaya pendidikan, besaran jaminan pendidikan daerah sudah dapat memenuhi 90%. Pada tahun 2007 diperkirakan cakupan pemberian jaminan pendidikan daerah untuk anak sekolah tidak mampu sebesar 100%, sedangkan dari sisi komponen standar biaya pendidikan, besaran jaminan pendidikan daerah mendekati 100%. Prediksi angka putus sekolah tahun 2007 yang masih cukup tinggi disebabkan karena permasalahan putus sekolah tidak hanya sebatas masalah ekonomi namun lebih pada rendahnya motivasi bersekolah dan adanya permasalahan lainnya.

---

<sup>7</sup> Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2006 belum sesuai dengan target yang diharapkan akibat kenaikan harga BBM dan bencana gempa bumi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup> pada tahun 2006 sebesar 3,96% dan pada tahun 2007 diprediksi naik menjadi 5,13%. Tingkat inflasi pada tahun 2006 sebesar 10,40 dan diprediksikan pada tahun 2007 menurun menjadi 9,92. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2006 sebesar Rp 4.574.051.000.000,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 4.857.180.000.000,-, sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2006 sebesar Rp 10.412.618,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 10.724.997,-

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Meskipun terjadi bencana alam gempa bumi pada pertengahan tahun 2006, namun dengan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan pada tahun 2007 Pendapatan Daerah dapat meningkat. Pendapatan Daerah pada tahun 2006 sebesar Rp 519.022.237.321,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 583.870.280.000,- atau 12,49 %.

d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Bencana alam gempa bumi tahun 2006 telah mengakibatkan rusaknya rumah penduduk dan fasilitas produksi yang juga diikuti dengan adanya kenaikan harga bahan pokok pangan. Hal tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyebabkan semakin

---

<sup>8</sup> Sumber : BPS Kota Yogyakarta

meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan pemberian jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana perkotaan dan peningkatan investasi. Pemberian jaminan sosial diberikan kepada masyarakat miskin, sedangkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana perkotaan dan peningkatan investasi dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan. Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin kejelasan hak masing-masing pihak, selain itu perijinan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi. Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik, sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan vertikal dalam skala besar sehingga dapat mengganggu iklim investasi. Kondisi tersebut perlu dijaga bersama dengan seluruh *stakeholder*.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 tentang Parameter Kemiskinan dengan 21 indikator, maka penduduk miskin yang berdomisili di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 berjumlah 86.055 orang atau 25.855 KK, sedangkan berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 Tahun 2007 dengan 18 parameter maka jumlah penduduk miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2007 sebesar 65.456 orang atau 26.525 KK. Jumlah penduduk miskin tersebut belum termasuk penduduk miskin Kota Yogyakarta yang belum wajib memiliki KTP

sebanyak 21.498 orang. Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi ulang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007 tanggal 6 Oktober 2007 jumlah penduduk miskin menjadi 89.818 orang atau 26.685 KK. Perubahan data kemiskinan tersebut tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan parameter yang digunakan untuk mendata.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, diprediksikan angka kemiskinan pada akhir tahun 2007 tidak mengalami perubahan. Pengangguran pada tahun 2006 berjumlah 31.884 orang diprediksikan pada tahun 2007 menurun menjadi 30.728 orang, turun 1.156 orang atau 3,62%.

e. Perwujudan Kota Sehat

Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pengertian sehat disini meliputi kesehatan jasmani, rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan<sup>9</sup> adalah meningkatnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu indikator budaya bersih adalah angka bebas jentik minimal 95%, pada tahun 2006 hasil yang dicapai baru 77,9%. Disisi lain, capaian angka kematian bayi 7,62 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan 61,7 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun umur harapan hidup laki-laki adalah 66,38 tahun dan perempuan 70,25 tahun. Pada tahun 2007 diprediksikan angka bebas jentik naik menjadi 85%, capaian angka kematian bayi turun menjadi 3,7 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu

---

<sup>9</sup> Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

melahirkan dipertahankan tetap sebesar 61,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan umur harapan hidup laki-laki diperkirakan tetap 66,38 tahun dan perempuan 70,25 tahun.

f. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Meskipun pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terus dilakukan, namun menurut penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan pakta integritas tersebut diharapkan semakin berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi pemerintah, serta meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif.

Setelah penandatanganan pakta integritas tersebut akan segera diikuti dengan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan KKN. Dengan penandatanganan pakta integritas dan penyusunan rencana aksi daerah serta meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan diharapkan indikator yang menunjukkan adanya KKN pada tahun 2007 semakin berkurang. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menekan jumlah temuan, yaitu pada tahun 2006 atas pemeriksaan TA 2005 ada 20 dan pada tahun 2007 atas pemeriksaan

TA 2006 ada 15. Keluhan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat dipantau melalui UPIK juga mengalami penurunan, yaitu dari 762 keluhan pada tahun 2006 menjadi 452 keluhan pada tahun 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 terdapat 105 temuan dan pada tahun 2007 telah dilakukan kerjasama dengan Forum Pemantau Independen (FORPI) serta BPKP, KPK dan Menpan sehingga diharapkan terjadi penurunan temuan.

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam upaya menuju terwujudnya *good governance* faktor penting yang perlu ditekankan antara lain (1) standar pelayanan yang baik, (2) kualitas pelayanan yang memuaskan, (3) aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional, serta (4) sistem yang lebih komprehensif. Pelayanan untuk bidang perijinan semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat menjadi 75,05 pada bulan Oktober 2007 dari tahun 2006 yang sebesar 74,92. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta terus ditingkatkan kualitasnya melalui kursus maupun jenjang pendidikan formal. Sampai saat ini prosentase pegawai dengan strata pendidikan SMA sebanyak 28,19%, D-3 25,75%, S-1 37,10%, S-2 1,74%, dan sisanya SLTP dan SD. Pelaksanaan reformasi dan birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berjalan baik didukung dengan jumlah dan kualifikasi pendidikan personil, sarana dan prasarana yang memadai serta penataan kelembagaan.

Di bidang pelayanan catatan sipil dan kependudukan telah diterapkan kontrak pelayanan (*citizen charter*)<sup>10</sup>. Di bidang pelayanan perijinan telah dibentuk Dinas Perijinan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan ijin. Pada tahun 2006 jenis perijinan yang dilayani oleh Dinas Perijinan adalah 35 jenis. Dari 35 jenis perijinan tersebut yang didukung dengan pengaturan melalui Peraturan Daerah

---

<sup>10</sup> Sumber : BKKBC Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta baru sejumlah 15 jenis. Pada tahun 2007 jumlah Peraturan Daerah yang menjadi landasan pelaksanaan perijinan direncanakan bertambah 2 Perda menjadi 17 jenis.

Penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan *performance* birokrasi, sehingga reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pegawai negeri telah ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Disamping hal tersebut dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai yang akan dipromosikan/mutasi untuk menduduki jabatan tertentu telah dilakukan seleksi secara obyektif melalui *assesment* yang dilakukan oleh lembaga independen.

h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Pasca bencana alam gempa bumi di Kota Yogyakarta pada pertengahan tahun 2006 mempengaruhi kondisi perumahan dan fasilitas umum di Kota Yogyakarta. Pada akhir tahun 2006 sebagian infrastruktur perkotaan seperti jalan dan jembatan, serta gedung perkantoran, sekolah dan puskesmas yang mengalami kerusakan, sudah dibangun dan berfungsi kembali meskipun belum optimal. Kondisi jalan pada tahun 2006 yang baik ada 86.990,8 Km, kondisi sedang 107.873,4 Km dan kondisi rusak 43,243 Km.

Melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari APBN pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007 telah direhabilitasi rumah penduduk yang roboh dan rusak berat. Beberapa fasilitas transportasi antara lain APILL, marka dan rambu telah direhabilitasi sehingga dapat berfungsi lebih optimal. Peningkatan lingkungan permukiman melalui perbaikan

prasarana dasar permukiman telah dilaksanakan melalui fasilitasi pemugaran rumah, perbaikan kamar mandi dan wc umum, perbaikan gedung pertemuan warga, penerangan jalan kampung dan pembangunan IPAL komunal. Untuk mendukung aktifitas masyarakat di tingkat wilayah, juga telah dibebaskan 4 (empat) bidang tanah yang kemudian dikelola oleh masyarakat. Selain itu juga telah dibebaskan 2 (dua) bidang tanah untuk pembangunan fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai upaya tersebut telah dioptimalkan pada tahun 2007 sehingga diproyeksikan sarana dan prasarana akan semakin meningkat kualitasnya.

i. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor telah mengakibatkan tingginya polusi udara di Kota Yogyakarta. Untuk memperbaiki kualitas udara diupayakan melalui pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau. Untuk memperindah wajah kota telah diupayakan melalui penerangan jalan umum dan lampu-lampu hias. Dengan tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku, Wujudkan Nyata" berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah. Kondisi saat ini luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 26,8% dari luas wilayah. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2007 serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat, luas RTH tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga tingkat polusi semakin berkurang dan meningkatnya kualitas lingkungan.

j. Pengurangan Risiko Bencana

Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah bencana gempa bumi. Upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi melalui



mitigasi bencana gempa bumi perlu dilakukan. Aspek penting dalam mitigasi dampak bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum, pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif dan sistem dan prosedur penanganan bencana. Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif, sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan.

## **1.2. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2008**

Berbagai pencapaian di tahun 2006 dan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2007, maka masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya  
Kepariwisataan pada tahun 2006 menurun jika dibandingkan tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya bencana alam gempa bumi dan belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya. Dengan berbagai capaian pelaksanaan penanganan pasca gempa tahun 2006 disertai perkiraan target jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal (*length of stay*) tahun 2007, masalah utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tahun 2008 adalah :
  - a. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya
  - b. Belum optimalnya peran serta masyarakat
  - c. Masih kurangnya promosi pariwisata yang tepat sasaran dan kurangnya koordinasi dalam berpromosi dengan pemangku kepentingan khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota serta pelaku pariwisata
  - d. Masih kurangnya pengembangan seni yang dapat mendukung pariwisata

- e. Pertunjukan seni dan budaya yang belum optimal sehingga belum menjadi daya tarik wisatawan
- f. Belum optimalnya pembangunan jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kepariwisataan
- g. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata, antara lain :
  - bercampurnya berbagai moda angkutan dalam satu jalur sehingga tidak tertibnya arus lalu lintas
  - masih adanya gelandangan, pengemis dan anak jalan yang berada di obyek wisata dan tempat strategis lainnya
  - belum seluruh tempat wisata dilengkapi dengan prasarana kebersihan
  - beberapa tarif angkutan penumpang yang tidak seragam dan pasti
  - di beberapa kawasan program penghijauan dan penerangan jalan umum dalam mewujudkan *city beautification* di malam hari belum dapat ditangani secara optimal

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. Menyusun strategi promosi sesuai segmentasi pasar wisatawan
- b. Melakukan promosi untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi
- c. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya
- d. Menciptakan diversifikasi produk wisata
- e. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- f. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengembalikan kapasitas usahanya
- g. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona
- h. Menyusun *calender of event* seni dan budaya secara periodik
- i. Membangun jaringan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain
- j. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata

## 2. Belum Optimalnya Pengembangan Pendidikan Berkualitas

Permasalahan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit, dengan demikian permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan menurut kelompok faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. Mutu produk/lulusan
  - masih adanya angka putus sekolah
- b. Mutu proses pembelajaran
  - belum optimalnya pembelajaran masyarakat
- c. Mutu layanan sekolah
  - belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi
  - belum semua guru memiliki sertifikat profesi
  - kesenjangan mutu antar sekolah
- d. Mutu lingkungan sekolah
  - belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas
  - belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif

Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. Mutu produk/lulusan
  - meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan
- b. Mutu proses pembelajaran
  - menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat.
  - meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ, EQ, dan SQ
- c. Mutu layanan sekolah
  - meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling
  - pemerataan akses pendidikan

- meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi
  - akreditasi sekolah
- d. Mutu lingkungan sekolah
- menciptakan suasana pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan
  - meningkatkan sarana prasarana sekolah
3. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
- Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005, mengakibatkan belum optimalnya investasi dan daya saing produk. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2007 karena dampak dari bencana alam gempa bumi.

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah Kota Yogyakarta disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara normal pasca bencana alam gempa bumi, yaitu beberapa pasar masih perlu pembenahan seperti pasar Beringharjo lantai III, pasar Giwangan, pasar Serangan dan pasar Tunjungsari. masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta
- b. masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah
- c. belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif
- d. belum optimalnya dukungan bank/lembaga keuangan pada sektor riil dan UMKMK
- e. masih rendahnya akses permodalan bagi UMKMK

Belum optimalnya pertumbuhan pendapatan daerah Kota Yogyakarta disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. belum tersedianya *database* potensi pendapatan daerah yang memadai

- b. belum mantapnya sistem manajemen pemungutan pajak dan retribusi
- c. belum semua aset daerah dimanfaatkan secara optimal
- d. tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi masih relatif rendah

Kondisi perekonomian<sup>11</sup> yang menurun tersebut juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga belum sepenuhnya potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Pada Tahun Anggaran 2006 pendapatan asli daerah sebesar Rp 96.419.456.304,52,- sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 104.162.882.000,-. Pendapatan tersebut masih dimungkinkan untuk ditingkatkan, sehingga akan semakin mendekati potensi yang dimiliki. Selain mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah juga dapat ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada masyarakat/swasta untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dengan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. mengembangkan perdagangan dan industri, khususnya sektor UMKMK
- b. merumuskan regulasi dan perijinan yang dapat mendorong masyarakat/swasta dalam meningkatkan perekonomian
- c. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah
- d. mengembangkan etika bisnis bagi pengusaha UMKMK
- e. menjalin kemitraan dengan dunia usaha

#### 4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya teratasi sebagai akibat krisis ekonomi, khususnya pada sektor riil. Kondisi tersebut lebih diperburuk dengan kenaikan harga 9 bahan pokok khususnya pertengahan tahun 2007. Kenaikan tersebut mengakibatkan biaya

---

<sup>11</sup> Sumber : BPKD Kota Yogyakarta

produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan tingginya angka kemiskinan. Permasalahan lain yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. kerugian yang disebabkan oleh bencana gempa bumi terutama ditanggung oleh sektor swasta, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan penambahan kesempatan kerja.
- b. belum optimalnya investasi asing dan dalam negeri yang masuk di Kota Yogyakarta, sehingga pengangguran belum dapat terserap
- c. belum pulihnya sektor riil, sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.
- d. kenaikan harga-harga bahan produksi juga mengakibatkan kenaikan biaya produksi, untuk tetap dapat mempertahankan harga jual produk yang tetap kompetitif salah satu upaya adalah mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang tersedia.
- e. kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kebutuhannya, mengakibatkan tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sehingga taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.
- f. besarnya jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.

Dengan kondisi dan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin
- b. menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik calon investor
- c. mengendalikan kenaikan harga 9 kebutuhan pokok dengan operasi pasar

- d. meningkatkan kesempatan kerja, produktifitas pekerja, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
- e. mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat
- f. meningkatkan akses permodalan, khususnya sektor riil

5. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan

Kondisi derajat kesehatan masyarakat yang hanya dilihat dari indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, ternyata masih terdapat permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya yaitu :

- a. persentase balita dengan status gizi buruk ada kecenderungan meningkat
- b. kenaikan angka kematian bayi
- c. kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah
- d. ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi
- e. partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah
- f. belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
- g. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan

Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan balita
- b. peningkatan, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan
- c. peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
- d. permasyarakatan budaya perilaku hidup sehat

6. Belum Optimalnya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Mewujudkan *Clean Government* (Pemerintah yang Bersih)
- Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dilaksanakan secara intensif namun hasilnya masih belum optimal. Adapun permasalahan–permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :
- a. adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang
  - b. belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat
  - c. masih rendahnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum
  - d. masih rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai
- Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:
- a. penegakan hukum dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
  - b. optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan *clean goverment*
  - c. melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten
  - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai
7. Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Birokrasi dalam rangka Mewujudkan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)
- Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, kendati demikian hasilnya masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi disebabkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
- a. belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur
  - b. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal
  - c. belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja
- Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:
- a. peningkatan kualitas pelayanan publik



- b. pembenahan manajemen kepegawaian
- c. penerapan pemberian penghargaan dan hukuman serta pembinaan pegawai

8. Menurunnya Kualitas Sarana Prasarana

Pasca Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006 lalu berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana, belum terselesainya pembangunan kembali sarana prasarana tersebut masih merupakan permasalahan. Sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. kerusakan sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih, sanitasi perkotaan, perumahan dan permukiman, jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali
- b. masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan
- c. belum tertatanya sistem transportasi yang baik.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan
- c. meningkatkan sistem transportasi perkotaan

9. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Permasalahan lingkungan hidup yang masih dihadapi adalah :

- a. meningkatnya polusi udara
- b. belum optimalnya pengelolaan sampah

- c. belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat
- d. kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana perkotaan

#### 10. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam

Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat, sehingga dalam tahun 2007 ini masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. berbagai upaya penanganan bencana alam belum dapat menuntaskan dampak dari bencana alam
- b. belum terumuskannya mitigasi bencana secara jelas

Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. penuntasan dampak bencana terhadap sarana dan prasarana perkotaan
- b. mengembangkan manajemen bencana berbasis masyarakat sehingga mampu meminimalkan dampak bencana

## II. GAMBARAN UMUM RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007–2011 yang dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2008.

## 2.1. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Kota Yogyakarta dengan predikat Kota Pendidikan, Pariwisata, Budaya, Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Provinsi DIY serta keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa menjadi daya tarik bagi daerah sekitar dan juga daerah lainnya di Indonesia. Predikat tersebut menjadikan sektor pariwisata dan pendidikan sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah. Di samping itu nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta semakin memperkuat predikat tersebut.

Melihat posisi kota Yogyakarta yang berada hampir tepat di tengah wilayah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan modal positif bagi perkembangan pariwisata daerah kabupaten/kota di sekitarnya. Yogyakarta sebagai daerah kunjungan wisata kedua setelah Bali cukup menjadi magnet wisatawan bagi domestik maupun mancanegara. Diharapkan akan dapat memberikan *multiplier effect* bagi penduduk Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta pada tahun 2008 akan mengandalkan potensi pariwisata yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya telah menghasilkan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat khususnya pada bidang kepariwisataan sehingga dapat menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta secara *signifikan*. Proporsi sumbangan pendapatan dari sektor kepariwisataan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar sehingga berpengaruh kuat terhadap kapasitas keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2008 maka tema pembangunan dan pelaksanaan tahun kedua RPJMD adalah "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata".

Makna "Pariwisata Berbasis Budaya" adalah kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dan

berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak dan daerah lain. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan terobosan baru yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan dan wisata belanja, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Makna "Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata" adalah bahwa pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta yang didasarkan pada budaya perlu didukung dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata. Keragaman tersebut antara lain wisata belanja, wisata konvensi, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan. Keragaman atraksi dan daya tarik wisata mengandung makna pula tuntutan untuk selalu kreatif dan kompetitif dari seluruh perilaku wisata untuk selalu mengembangkan potensi dan menangkap peluang pasar yang kadang-kadang dinamis.

Penjabaran dan implementasi tema pembangunan Tahun 2008 dituangkan dalam prioritas pembangunan di bawah ini.

## **2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 ditetapkan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja;
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2008 disusun dalam rangkaian logis Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan. Mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada prioritas pembangunan, maka program dan kegiatan dalam RKPD perlu mendapat dukungan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah provinsi dan pusat.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat strategis dan penting. Rangkuman program dan kegiatan tersebut merupakan Rencana Aksi Daerah yang menjadi prioritas pembangunan Kota Yogyakarta. Rencana Aksi Daerah dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi menjamin kelancaran dan kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan harus dihadapi pada tahun 2008, maka prioritas pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
2. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
5. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
6. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan
10. Pengurangan Risiko Bencana

Apabila dihubungkan dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2008, maka 10 (sepuluh) prioritas tersebut saling melengkapi. Prioritas nasional peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja dituangkan dalam prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya, prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dan prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Prioritas nasional revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan dituangkan dalam prioritas prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Prioritas nasional percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi dituangkan dalam prioritas pembangunan sarana dan prasarna berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Prioritas nasional peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan dan kesehatan dituangkan dalam prioritas mewujudkan pendidikan berkualitas dan mewujudkan Yogyakarta kota sehat. Prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam prioritas penanggulangan kemiskinan dan penangguran. Prioritas nasional pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam prioritas pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prioritas penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang secara sepintas disinggung dalam prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya dan prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Prioritas nasional penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular dituangkan dalam prioritas pengurangan resiko bencana, mewujudkan Yogyakarta kota sehat serta pembangunan sarana dan prasarana berkualitas.

Prioritas pembangunan tahun 2008 tersebut di atas dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Rencana Aksi Daerah sebagai berikut :

### **1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya**

Tujuan rencana aksi daerah pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu :

- a. meningkatkan peran pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya yang berbasis pada budaya lokal;
- c. meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara;
- d. meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional;
- e. berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi;
- f. meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja;
- b. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

### **2. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas**

Tujuan rencana aksi daerah mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :

- a. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;

- b. meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tingkat Rukun Warga (RW);
- c. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru;
- d. mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual;
- e. memperluas jangkauan dalam pembelajaran masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
- b. mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual;
- c. memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

### **3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah**

Tujuan rencana aksi daerah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yaitu :

- a. mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha;
- c. menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau;
- e. meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian;
- f. meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- g. mengurangi jumlah pelanggaran serta meningkatkan PAD;
- h. memfasilitasi kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan jasa;



- i. menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;
- j. meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- k. meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
- b. mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi;
- c. mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

#### **4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Tujuan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yaitu :

- a. memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran;
- b. mengurangi jumlah penduduk miskin;
- c. mengurangi tingkat pengangguran;
- d. meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
- f. meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun bagi penduduk miskin;
- g. mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas;
- h. menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok

masyarakat yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan difabel;

- b. menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat guncangan ekonomi dan sosial;
- c. meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin;
- d. perluasan jangkauan pendidikan khusus bagi masyarakat miskin;
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;
- f. mengembangkan usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- g. meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin;
- h. meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **5. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat**

Tujuan rencana aksi daerah mewujudkan Yogyakarta kota sehat yaitu :

- a. meningkatkan *surveillance* kewaspadaan dini gizi buruk;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima;
- c. mengurangi angka kematian bayi dan balita;
- d. meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan;
- e. mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- g. meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju *universal coverage*.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan), *surveillance* serta monitoring kesehatan;
- b. meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, rumah sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.

#### **6. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih**

Tujuan rencana aksi daerah pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pemerintah yang bersih yaitu :

- a. meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;
- d. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur;
- e. melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- f. meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku;
- b. meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum;
- c. mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## **7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tujuan rencana aksi daerah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

- a. meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran;
- d. menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan
- e. merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja;
- f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- g. meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik;
- b. mengoptimalkan pengelolaan teknologi Informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan;
- c. menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku;
- d. meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum;
- e. meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif;
- f. meningkatkan manajemen pembangunan yang responsif gender;
- g. mewujudkan sistem dan prosedur sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## **8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas**

Tujuan rencana aksi daerah pembangunan sarana dan prasarana berkualitas yaitu :

- a. memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik;
- b. tertatanya kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. memudahkan masyarakat mempergunakan sarana prasarana publik;
- d. meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan sarana dan prasarana;
- e. meningkatkan sarana dan prasarana dasar publik perkotaan yang memadai bekerjasama dengan daerah tetangga, khususnya melalui Sekretariat Bersama Kartomantul;
- f. meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta;
- b. meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik;
- d. meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan;
- e. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

## **9. Peningkatkan Kualitas Lingkungan**

Tujuan rencana aksi daerah peningkatkan kualitas lingkungan yaitu :

- a. memperbaiki kualitas lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku lingkungan;
- c. menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau;
- d. menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan;

- e. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan;
- f. meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan;
- g. mengendalikan pencemaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

#### **10. Pengurangan Risiko Bencana**

Tujuan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yaitu :

- a. menjadikan prioritas utama kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana;
- c. mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- d. meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia dengan perencanaan wilayah yang peduli/ peka terhadap bencana;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) rencana aksi daerah tersebut, maka target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

Tabel 1

### TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>				
Program Wajib Belajar 12 Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,7% menjadi 99,8% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99,95%; APS SMP 99,85%; APS SMA 99,46%; APS SMK 99,63%) Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 97% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%, SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%)	0.1%          1%	Dinas Pendidikan	193,200,000
1 Pengelolaan Pemberian Beasiswa			Dinas Pendidikan	193,200,000
Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana	Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 18% menjadi 33 % Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 76% menjadi 82%  Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 76% menjadi 82%  Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 56% menjadi 62%	15%  6%  6%  6%		16,060,926,500
1 Peningkatan Kualifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan	263,786,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3 Akreditasi Sekolah Swasta 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK)			Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	1,278,645,000 27,925,500 14,490,570,000
<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan dari 89% menjadi 92%</b>	<b>3%</b>		<b>28,589,532,600</b>
1 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri			Dinas Pendidikan	8,679,462,600
2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan			Dinas Pendidikan	78,732,000
3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar			Dinas Pendidikan	1,887,476,000
4 Penyelenggaraan Ulangan Umum			Dinas Pendidikan	236,262,300
5 Penerimaan Siswa Baru <i>On Line</i>			Dinas Pendidikan	197,734,000
6 Pengembangan Kesiswaan			Dinas Pendidikan	331,888,000
7 Penerbitan Media Komunikasi			Dinas Pendidikan	41,717,000
8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan	163,495,000
10 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A,B dan C			Dinas Pendidikan	282,244,000
11 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus			Dinas Pendidikan	60,268,000
12 Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP, SMA, SMK			Dinas Pendidikan	54,363,000
13 Usaha Kesehatan Sekolah & Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sekolah			Dinas Pendidikan	76,504,000
14 Penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan			Dinas Pendidikan	50,655,000
15 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan	128,704,000
16 Pengembangan Minat Baca dan Seni Siswa			Dinas Pendidikan	182,480,000
17 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan			Dinas Pendidikan	236,444,500
18 Pengelolaan dan Pemberian bantuan PAUD			Dinas Pendidikan	93,631,200
19 Pengelolaan Data Kependidikan			Dinas Pendidikan	88,055,300
20 Pembinaan Karier Pegawai			Dinas Pendidikan	10,976,829,000
21 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran			Dinas Pendidikan	121,490,000
22 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris			Dinas Pendidikan	54,065,000
23 Peningkatan Operasional Taman Pintar			Dinas Pendidikan	588,596,100
24 Pengembangan Kota Vokasi			Dinas Pendidikan	3,978,436,600



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan</b> 1 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan	Diperolehnya baku mutu diatas rata-rata 2% menjadi 4%	2%	Dinas Pendidikan	<b>80,280,000</b> 80,280,000
<b>URUSAN KESEHATAN</b>				
<b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan</b> 1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS 3 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 72% menjadi 74%</b>	2%	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	<b>970,705,000</b> 671,667,000 132,742,000 166,296,000
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan</b> 1 Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	<b>Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 41% menjadi 47%</b>	6%	Dinas Kesehatan	<b>741,045,000</b> 741,045,000
<b>Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b> 1 Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular 2 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 3 Pengendalian Penyakit Zoonosa	<b>Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%</b>	6%	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kantor pertanian & Kehewanan	<b>1,908,573,700</b> 1,439,003,700 384,131,000 85,439,000
<b>Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b> 1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Kelompok 2 Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin	<b>Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 42% menjadi 47%</b>	5%	Dinas kesehatan RSUD	<b>5,591,207,000</b> 4,636,707,000 954,500,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit</b>  1 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas 3 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan, Penelitian & Pengembangan Kesehatan 4 Pelayanan Administrasi Pasien 5 Pelayanan Penunjang Medis 6 Pelayanan Penunjang Non Medis 7 Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	<b>Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,73 menjadi 0,75</b>	<b>0.02</b>	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan  R S U D R S U D R S U D R S U D R S U D	<b>16,617,211,105</b>  4,501,699,500 2,505,081,200 302,351,300  3,507,339,500 4,787,390,000 425,243,000 320,231,605 267,875,000
<b>Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan</b>  1 Pengelolaan SDM dan Institusi Pelayanan Kesehatan 2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi bidang Kesehatan	<b>Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 48% menjadi 56%</b>	<b>8%</b>	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	<b>318,201,000</b>  154,381,500 163,819,500
<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				
<b>Program Perbaikan / Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase</b>  1 Normalisasi Drainase 2 Normalisasi Saluran Pengairan 3 Rehabilitasi Bangunan Air (DAK) 4 Pemeliharaan Pengairan & Drainase	<b>Kurangnya genangan air dari 84 titik menjadi 74 titik</b>	<b>10 titik</b>	Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil	<b>3,228,925,000</b>  400,000,000 813,755,000 1,553,975,000 461,195,000
<b>Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>  1 Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (L) 2 Peningkatan & Pemeliharaan Bangunan Pelengkap & Perlengkapan Jalan (BPPJ) 3 Peningkatan Jalan (DAK) 4 Peningkatan & Pemeliharaan Peralatan Perbekalan 5 Normalisasi Simpang	<b>Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 5% menjadi 9%</b>	<b>4%</b>	Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil  Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil	<b>9,443,225,600</b>  920,248,600 120,187,000 1,471,500,000  6,235,160,000 339,130,000 357,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum</b>  1 Peningkatan PJU Kampung 2 Peningkatan PJU Lingkungan 3 Pemeliharaan & Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel	Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.300 titik menjadi 17.700 titik	400 titik	Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil	<b>4,056,977,000</b>  700,000,000 500,000,000 2,856,977,000
<b>URUSAN PERUMAHAN</b>				
<b>Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman</b>  1 Pemeliharaan TPU 2 Perencanaan dan Penataan Prasarana Dasar Permukiman 3 Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK) 4 Counterpart Pengembangan/Pelaksanaan Perumahan Sederhana	Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%	2% dan 2%	Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil	<b>3,508,578,200</b>  596,078,200 400,000,000 2,312,500,000 200,000,000
<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam</b> 1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 2 Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan <i>respond time</i> dari 150 menit menjadi 120 menit	30 menit	Kantor Linmas dan PK Kantor Linmas dan PK	<b>293,705,000</b>  182,420,000 111,285,000
<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</b> 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatkan <i>respond time</i> dari 141 menit menjadi 13 menit	1 menit	Kantor Linmas dan PK Kantor Linmas dan PK	<b>669,232,500</b>  108,962,500 560,270,000
<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>				
<b>Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan</b>  1 Penyusunan Rencana Rinci dan Detail Kawasan 2 Pemantuan dan Pengembangan Data Base Tata Ruang dan Tata Bangunan	Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 33% menjadi 50%	17%	Dinas Kimpraswil Dinas Kimpraswil	<b>299,990,960</b>  149,992,000 149,998,960

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%</b>	<b>3%</b>		<b>1,439,537,500</b>
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			BAPPEDA	726,270,000
2 Penyusunan Pra FS Aset Daerah			BAPPEDA	413,034,000
3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pelayanan dan Sarana Prasarana			BAPPEDA	193,372,500
4 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata			BAPPEDA	106,861,000
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 82% menjadi 84%</b>	<b>2%</b>		<b>243,984,900</b>
1 Penelitian dan Pengembangan			BAPPEDA	243,984,900
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 83% menjadi 86%</b>	<b>3%</b>		<b>965,043,500</b>
1 Pengendalian Kegiatan			Bagian Pengendalian Pembangunan	299,953,000
2 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa			Bagian Pengendalian Pembangunan	54,316,000
3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Bagian Pengendalian Pembangunan	485,542,000
4 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			BAPPEDA	125,232,500
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 83 menjadi 85%</b>	<b>2%</b>		<b>206,051,250</b>
1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan			BAPPEDA	206,051,250

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>  1 Pengadaan Penyedia Jasa TKP	<b>Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 66% menjadi 72%</b>	<b>6%</b>	Dinas Perhubungan	<b>185,004,000</b>  185,004,000
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>  1 Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Umum 2 Optimalisasi Perijinan Angkutan 3 Operasional SAUM	<b>Peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 66% menjadi 72%</b>	<b>6%</b>	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	<b>602,751,000</b>  302,475,000 199,626,000 100,650,000
<b>Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas</b>  1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda & Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan 2 Survey Bidang Lalu Lintas 3 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	<b>Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 66% menjadi 72%</b>	<b>6%</b>	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	<b>633,646,000</b>  328,326,000 92,160,000 213,160,000
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</b>  1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	<b>Meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 66% menjadi 72%</b>	<b>6%</b>	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	<b>986,641,000</b>  383,986,000 602,655,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
<b>Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61% menjadi 62%</b>	<b>1%</b>		<b>2,466,044,810</b>
1 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan			Dinas Lingkungan Hidup	585,316,000
2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan & SAL			Dinas Lingkungan Hidup	227,178,000
3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan dan Air Bawah Tanah			Dinas Lingkungan Hidup	80,555,000
4 Prokasih GKS			Dinas Lingkungan Hidup	65,556,750
5 Program Langit Biru (Prolabir)			Dinas Lingkungan Hidup	195,370,060
6 Pembinaan & Evaluasi Kebersihan Lingkungan			Dinas Lingkungan Hidup	67,549,000
7 Sarana Prasarana Pemantuan Kualitas Lingkungan (DAK)			Dinas Lingkungan Hidup	1,244,520,000
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81% menjadi 82%</b>	<b>1%</b>		<b>6,760,705,125</b>
1 Pembersihan Sampah			Dinas Lingkungan Hidup	2,434,652,725
2 Pengangkutan Sampah			Dinas Lingkungan Hidup	2,836,782,400
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan dan SAL			Dinas Lingkungan Hidup	478,110,000
4 Perbengkelan				1,011,160,000
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah</b>	<b>Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21% menjadi 22%</b>	<b>1%</b>		<b>1,918,764,110</b>
1 Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)			Dinas Lingkungan Hidup	1,080,946,750
2 Pemeliharaan & Peningkatan Sarana Prasarana SAL			Dinas Lingkungan Hidup	837,817,360
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26,8%</b>	<b>26.8%</b>		<b>1,451,264,595</b>
1 Pemeliharaan & Peningkatan Taman Kota			Dinas Lingkungan Hidup	1,249,261,095
2 Pemeliharaan & Peningkatan Jalur Hijau			Dinas Lingkungan Hidup	202,003,500

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>  1 Pembuatan KTP/KIA dan KK di Kota Yogyakarta 2 Pembuatan Buku Register dan Akta Catatan Sipil 3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 4 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	<b>Meningkatnya database kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 67% menjadi 75%</b>	<b>8%</b>	BKKBC BKKBC BKKBC BKKBC	<b>1,000,852,175</b>  562,336,840 124,706,410 69,578,925 244,230,000
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutamaan Gender</b>  1 Pengarusutamaan Gender 2 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan	<b>Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 44% menjadi 48%</b>	<b>4%</b>	Bag. Kesmas & PUG Bag. Kesmas & PUG	<b>496,271,000</b>  298,500,000 197,771,000
<b>URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				
<b>Program Keluarga Berencana</b>  1 Peningkatan KB dan Keluarga Sejahtera (DAK)	<b>Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 15 menjadi 14</b>	<b>1 CBR</b>	BKKBC BKKBC	<b>640,266,800</b>  640,266,800
<b>URUSAN SOSIAL</b>				
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b> 1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos	<b>Meningkatnya PSKS sebesar 2%</b>	<b>2%</b>	Dinas Kesos Dinas Kesos	<b>825,239,000</b>  492,374,000 332,865,000
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> 1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 2 Peningkatan Pelayanan Kesos dalam Panti Sosial 3 Santunan Kematian Pemegang KTP 4 Peningkatan Pelayanan PMKS 5 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma	<b>Menurunnya PMKS sebesar 2%</b>	<b>2%</b>	Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos	<b>2,068,091,750</b>  294,738,000 57,438,000 67,123,000 218,455,000 487,235,000 338,210,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
7 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 8 Pendataan PMKS dan PSKS 9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial			Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos	340,887,750 173,740,000 90,265,000
<b>Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 56% menjadi 62%</b>	<b>6%</b>		<b>423,117,000</b>
1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 2 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan			Bag. Kesmas & PUG Bag. Kesmas & PUG	105,467,000 317,650,000
<b>Program Peningkatan Kehidupan Beragama</b>	<b>Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama</b>	<b>2%</b>		<b>18,110,000</b>
1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Keagamaan dan Kemasyarakatan			Bag. Kesmas & PUG	18,110,000
<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>				
<b>Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 5.03% menjadi 6,53%</b>	<b>1.5%</b>		<b>647,437,600</b>
1 Pendidikan & Pelatihan bagi Pencari Kerja 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	611,717,600 35,720,000
<b>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</b>	<b>Menurunnya jumlah penganggur dari 6,08% menjadi 6%</b>	<b>0.08%</b>		<b>304,447,000</b>
1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian 3 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,127,000 108,651,000 115,669,000



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</b>	<b>Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%</b>	<b>2%</b>		<b>150,559,000</b>
1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95,670,000
2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K3			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54,889,000
<b>URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>				
<b>Program Pengembangan Kewirausahaan &amp; Keunggulan Kompetitif UMKMK</b>	<b>Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 106 Milyar menjadi Rp 112 Milyar</b>	<b>Rp.6 Milyar</b>		<b>1,765,963,000</b>
1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan			Disperindagkop	102,880,000
2 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia			Disperindagkop	104,420,000
3 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah			Disperindagkop	578,510,000
4 Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil			Disperindagkop	188,150,000
5 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah			Disperindagkop	51,945,000
6 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi			Disperindagkop	76,230,000
7 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP			Disperindagkop	204,827,000
8 Pembinaan Koperasi			Disperindagkop	220,076,000
9 Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranas			Disperindagkop	238,925,000
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>				
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya</b>	<b>Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 135 menjadi 158 kekayaan budava</b>	<b>23 kekayaan budaya</b>		<b>2,029,171,100</b>
1 Festival, Lomba dan Gelar Seni dan Budaya			Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	1,595,975,000
2 Pelestarian Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya			Dinas Pariwisata Seni dan Budaya	433,196,100

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda</b>	<b>Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4%</b>	<b>4%</b>		<b>171,442,500</b>
1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda			Kantor Kesbangpor	171,442,500
<b>Program Fasilitas Olah Raga</b>	<b>Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%</b>	<b>4%</b>		<b>119,394,000</b>
1 Pembinaan & Pengembangan Olah Raga			Kantor Kesbangpor	119,394,000
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%</b>			<b>125,826,000</b>
1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan			Kantor Kesbangpor	125,826,000
<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%</b>	<b>1%</b>		<b>1,982,547,300</b>
1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi			Dinas Ketertiban	337,364,000
2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			Dinas Ketertiban	355,643,300
3 Operasi dan Patroli Ketertiban Umum			Dinas Ketertiban	452,609,000
4 Pengamanan Khusus			Dinas Ketertiban	587,412,000
5 Penyelenggaraan Pemberantasan Pekat			Dinas Ketertiban	249,519,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 81% menjadi 85%</b>	<b>4%</b>		<b>481,383,000</b>
1 Fasilitas Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah			Bagian Protokol	128,338,000
2 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Seremonial Lainnya			Bagian Protokol	322,400,000
3 Pembutan Naskah Sambutan			Bagian Protokol	30,645,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah</b>  1 Pengasuransian Barang Daerah 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana, DKB/DKPB, RKBURKPBUR 3 Penghapusan Barang Daerah 4 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Barang 5 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta  6 Pelaksanaa Sensus Barang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 8 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah	<b>Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 83% menjadi 84.5%</b>	<b>1.5%</b>	BPBD BPBD  BPBD BPBD  BPBD  BPBD  BPBD	<b>1,568,287,500</b>  832,825,000 33,310,000  111,205,000 78,270,000  90,870,000  306,120,000  73,672,500  42,015,000
<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan</b>  1 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 2 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4 Pembuatan Tandon Air KPMK 5 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD 6 Peningkatan Sarana Prasarana Gedung SD (Conblock SD) 7 UPT COR Logam 8 Pembangunan Pagar Bangunan Panti Wreda dan Panti Asuhan 9 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran 10 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran  11 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum 12 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan	<b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 84% menjadi 87%</b>	<b>3%</b>	BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD  BPBD BPBD  BPBD BPBD	<b>41,068,521,264</b>  1,787,635,000 3,033,755,000 1,774,830,000 175,200,000 2,785,635,000 929,438,750 1,507,020,380 538,365,000  750,000,000 2,021,900,000  1,784,368,500 5,447,300,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
13 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan			BPBD	1,306,001,500
14 Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Pendidikan			BPBD	508,500,000
15 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan dan Timur			BPBD	574,059,500
16 Pembangunan Taman Pintar			BPBD	2,000,000,000
17 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni			BPBD	5,806,939,000
18 Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan (Kranisasi)			BPBD	143,461,388
19 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah			BPBD	100,000,000
20 Penyempurnaan Fasilitas Pendidikan (Keramik)			BPBD	613,000,000
21 Pembangunan Panti Karya			BPBD	825,000,000
22 Pembangunan Kantor Depag Kota Yogyakarta			BPBD	1,899,465,000
23 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik			Bag. Tapem	1,352,020,000
24 Pembangunan Pasar Tunjungsari			BPBD	750,000,000
25 Pembangunan Taman Pintar (L)			BPBD	431,676,297
26 Rehabilitasi Puskesmas Tersebar			BPBD	710,623,049
27 Pembangunan Gedung Ex DPRD Tahap III			BPBD	361,458,900
28 UPT COR Logam (L)			BPBD	1,150,869,000
<b>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%</b>	<b>3%</b>		<b>2,757,267,265</b>
1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah			BPBD	1,804,817,650
2 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor/Alat Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta			BPBD	580,000,000
3 Pemeliharaan dan Peningkatan Pasar Tersebar			BPBD	200,000,000
4 Pemeliharaan Puskesmas Tersebar			BPBD	172,449,615
<b>Program Peningkatan Pelayanan ke Rumah Tanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 83% menjadi 86%</b>	<b>3%</b>		<b>448,372,750</b>
1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah			Bagian Umum	163,510,500
2 Pelayanan Kerumahtanggan			Bagian Umum	284,862,250

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>  1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perijinan 3 Pengawasan dan Pengaduan Perijinan di Kota 4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perijinan 5 Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan	<b>Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 76% menjadi 82%</b> <b>Ketersediaan regulasi perizinan dari 48% menjadi 56%</b>	<b>6%</b>  <b>8%</b>	Dinas Perizinan Dinas Perizinan Dinas Perizinan Dinas Perizinan Dinas Perizinan	<b>743,525,500</b>  273,011,000 228,740,000 71,526,000 11,597,000 158,651,500
<b>Program Pengembangan Kerjasama Daerah</b>  1 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan 2 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah	<b>Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 72% menjadi 74%</b>	<b>2%</b>	Bagian Kerjasama Bagian Kerjasama	<b>535,684,500</b>  228,597,000 307,087,500
<b>Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan</b>  1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi	<b>Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 62% menjadi 64%</b>	<b>2%</b>	Kec. Tegalgrejo Kec. Jetis Kec. Gondokusuman Kec. Danurejan Kec. Gedongtengen Kec. Pakualaman	<b>251,446,000</b>  32,151,000 3,040,000 5,363,000 3,280,000 21,174,500 3,040,000 22,322,000 6,715,000 12,147,000 3,040,000 10,378,000 3,040,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi 1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 2 Penyebarluasan Informasi			Kec. Ngampilan Kec. Wirobrajan Kec. Mantrijeron Kec. Kraton Kec. Gondomanan Kec. Mergangsan Kec. Umbulharjo Kec. Kotagede	10,582,000 3,040,000 15,104,000 3,040,000 5,461,500 3,040,000 4,999,500 3,670,000 17,776,000 3,280,000 11,953,000 3,190,000 28,280,500 4,340,000 4,959,000 3,040,000
<b>Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  1 Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem 2 Penyusunan LKPJ 2007 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 3 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 5 Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan 6 Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah 7 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, Pensertifikatan Tanah	<b>Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan , evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 82% menjadi 84%</b>	<b>2%</b>	Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem Bag. Tapem	<b>1,212,322,200</b>  378,169,500 85,768,000 264,373,500 106,820,000 110,795,700 127,465,500 138,930,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan</b>  1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 64% menjadi 68%	4%	Bag. Tapem	<b>1,615,251,000</b>  1,615,251,000
<b>Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian &amp; Pendapatan Daerah</b>  1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah 2 Peningkatan Pemanfaatan Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74% menjadi 78%	4%	Bag. P2D Bag. P2D	<b>1,127,974,000</b>  742,389,000 385,585,000
<b>Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah</b>  1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan 2 Optimalisasi Pajak Reklame 3 Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran 4 Optimalisasi Pajak Hiburan 5 Optimalisasi Pajak Parkir 6 Optimalisasi PBB dan BPHTB 7 Pendataan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran 8 Pembinaan, Penyuluhan Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak 9 Pengadaan Barang	Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 10% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 2.5%	10% dan 2,5%	KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD	<b>3,511,857,500</b>  72,738,000 133,672,000 51,162,000 30,700,000 30,970,000 676,740,000 2,147,168,000 192,447,500 176,260,000
<b>Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah</b>  1 Pengolahan Data Hukum/Penyusunan Renja Raperda 2 Pengkajian Peraturan Daerah	Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 79% menjadi 83%	4%	Bagian Hukum Bagian Hukum	<b>433,316,000</b>  316,416,000 116,900,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Peningkatan Pelayanan Hukum</b>  1 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta 2 Pembuatan dan Penerbitan LD dan Pengembangan JDI-H 3 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 4 Publikasi RPD ke Media Cetak	<b>Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 80% menjadi 85%</b> <b>Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 84% menjadi 88%</b>	5%  4%	Bagian Hukum  Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum	<b>825,706,000</b>  346,660,000 154,946,000 99,720,000 224,380,000
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> 1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD 2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 5 Pengelolaan Anggaran Bantuan 6 Pengelolaan Dana Perimbangan 7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran 8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 9 Implementasi SAKD 10 Pengelolaan Investasi Dana Daerah	<b>Meningkatnya penilaian BPK Wajar dari 86% menjadi 87%</b>	1%	BPKD BPKD  BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD BPKD	<b>1,994,974,000</b>  557,165,000 365,510,000  477,448,000 140,506,000 49,360,000 104,010,000 135,705,000 34,130,000 88,620,000 42,520,000
<b>Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/ PEMILU</b>  1 Dinamisasi Politik Lokal	<b>Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 20%</b>	20%	Sekretariat KPU	<b>42,822,500</b>  42,822,500
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</b>  1 Pelaksanaan Analisa Jabatan 2 Pemanjapan Kelembagaan Perangkat Daerah	<b>Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 83 menjadi 86</b>	3	Bag. Organisasi Bag. Organisasi	<b>1,075,620,682</b>  232,010,000 259,035,000



PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan			Bag. Organisasi	128,835,500
4 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			Bag. Organisasi	125,697,682
5 Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah			Bag. Organisasi	330,042,500
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</b>	<b>Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 9% menjadi 8%</b>	<b>1%</b>		<b>714,720,000</b>
1 Pemeriksaan Reguler			Bawasda	458,332,000
2 Pemeriksaan Khusus			Bawasda	197,058,000
3 Evaluasi Lakip			Bawasda	15,860,000
4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi			Bawasda	43,470,000
<b>Program Peningkatan Layanan pada DPRD</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 83% menjadi 86%</b>	<b>3%</b>		<b>8,808,150,700</b>
1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat			Sekretariat DPRD	491,520,000
2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD			Sekretariat DPRD	369,195,000
3 Pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD			Sekretariat DPRD	1,319,400,000
4 Penetapan Perda-Perda			Sekretariat DPRD	2,162,885,000
5 Pembahasan RAPBD			Sekretariat DPRD	286,284,000
6 Pembuatan KU dan PPAS			Sekretariat DPRD	231,268,000
7 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD			Sekretariat DPRD	2,713,095,000
8 Publikasi Kegiatan DPRD/ Kehumasan dan Protokoler DPRD			Sekretariat DPRD	801,761,000
9 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik			Sekretariat DPRD	92,495,000
10 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD serta Penyedia Jasa <i>Cleaning Service</i>			Sekretariat DPRD	145,262,700
11 Pemilihan Anggota Tim Seleksi KPU oleh DPRD			Sekretariat DPRD	194,985,000
<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>54,113,969,159</b>
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran			Dinas Pendidikan	5,479,937,000
			Dinas Kesehatan	3,920,807,600
			RSUD	3,020,499,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
			Dinas Kimpraswil	7,803,270,000
			Kantor Limas & PK	1,210,805,350
			BAPPEDA	243,096,750
			Dinas Perhubungan	2,359,811,200
			Dinas Lingkungan Hidup	6,111,296,925
			BKKBC	451,194,100
			Dinas Kesos	591,474,400
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	231,801,650
			Dinas Perindagkop	247,961,650
			Dinas Pansenbud	192,403,500
			Kantor Kesbangpor	75,456,000
			Dinas Ketertiban	2,288,285,700
			Sekda dan Ass Sekda	134,182,200
			Bagian Tapem	98,722,000
			Bagian Dalbang	104,022,450
			Bagian Hukum	125,108,750
			Bagian Organisasi	136,242,750
			Bagian Umum	1,499,685,950
			Bagian P2D	77,087,000
			Bagian Protokol	674,580,400
			Bagian Kerjasama	124,456,250
			Bag. Kesmas & PUG	90,112,450
			Sekretariat DPRD	2,596,846,750
			BPKD	1,133,807,750
			Bawasda	259,610,700
			Kec. Tegalrejo	408,092,300
			Kec. Jetis	356,123,615
			Kec. Gondokusuman	431,588,250
			Kec. Danurejan	422,873,575
			Kec. Gedongtengen	287,845,300
			Kec. Pakualaman	286,052,120
			Kec. Ngampilan	259,916,675
			Kec. Wirobrajan	324,865,100
			Kec. Mantrijeron	327,530,500

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
			Kec. Kraton Kec. Gondomanan Kec. Mergangsan Kec. Umbulharjo Kec. Kotagede BPBD KPPD Dinas Perizinan Sekretariat KPUD BKD BID Kantor Pertanian dan Kehewanan Din. Pengelolaan Pasar	317,346,500 275,285,000 326,823,500 602,602,300 341,396,250 1,922,511,920 471,494,400 459,926,750 97,588,744 433,326,950 705,790,900 815,777,085 2,956,645,200
<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>				
<b>Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian</b>  1 Penilaian Angka Kredit 2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai 4 Rekrutmen Pegawai 5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat 6 Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana & Hukuman Disipin 7 Pengelolaan Data SIMPEG dan File Pegawai 8 Penilaian Kinerja Pegawai 9 Pengelolaan Data PTT 10 Identifikasi Kebutuhan Sumberdaya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga 11 Tes Kesehatan PNS	<b>Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 72% menjadi 74%</b>	<b>2%</b>	BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD	<b>1,467,809,000</b>  73,809,000 68,736,000 127,590,000 741,396,000 195,655,000 57,782,000 55,443,000 65,170,000 30,249,000 16,819,000 35,160,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>  1 Pembinaan PPNS 2 Peningkatan Kualitas Pol PP 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 4 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawas Penyelenggaraan Diklat 5 Pengiriman Tugas Belajar & Pemberian Bantuan Ijin Belajar bagi PNS Daerah	<b>Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 74% menjadi 78%</b>	<b>4%</b>	Dinas Ketertiban Dinas Ketertiban Dinas Ketertiban Bawasda  BKD BKD	<b>2,774,939,600</b>  109,180,000 385,589,600 76,501,000 198,329,000  1,585,520,000 419,820,000
<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				
<b>Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>  1 Pengelolaan Arsip Daerah 2 Pengembangan Arsip Daerah	<b>Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 81% menjadi 82%</b>	<b>1%</b>	BID BID	<b>189,180,000</b>  94,895,000 94,285,000
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>  1 Pelayanan Program Kota melalui Berbagai Media 2 Pengelolaan UPIK 3 Penerbitan Majalah Ayodya 4 Pameran Sekaten 6 Peningkatan Sistem Pengamanan Jaringan 7 Pengembangan dan Pengelolaan E.GOV 8 Pembinaan Pengembangan IT 9 Penyusunan Media Publikasi	<b>Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%</b>	<b>1%</b>	BID BID BID BID BID BID BID BID	<b>7,102,600,475</b>  2,539,881,000 45,487,500 74,985,000 224,700,000 853,623,725 1,181,476,500 2,109,137,750 73,309,000
<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi</b>  1 Pengkajian & Penelitian Bidang informasi & Komunikasi	<b>Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%</b>	<b>1%</b>	BID	<b>13,575,000</b>  13,575,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PROGRAM	SKPD	PAGU INDIKATIF
<b>URUSAN PERTANIAN</b>				
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan</b>	<b>Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelas menjadi 111 kelas terdiri dari : kelas utama yaitu dari 2 kelas menjadi 3 kelas, kelas madya dari 10 kelas menjadi 14 kelas, kelas lanjut dari 27 kelas menjadi 27 kelas, kelas pemula dari 70 kelas menjadi 67 kelas</b>	<b>Kelas Utama 1, Madya 4, Lanjut 0, Pemula (-3).</b>		<b>4,335,683,500</b>
1 Pengembangan 3 UPTD			Kantor Pertanian dan Kehewanan	190,278,500
2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis (PIH)			Kantor Pertanian dan Kehewanan	118,336,000
3 Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan			Kantor Pertanian dan Kehewanan	127,628,000
4 Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan			Kantor Pertanian dan Kehewanan	119,882,000
5 Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Pertanian (DAK)			Kantor Pertanian dan Kehewanan	2,089,984,000
6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Pemasaran Hasil Perikanan Kota (DAK)			Kantor Pertanian dan Kehewanan	1,689,575,000
<b>Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan</b>	<b>Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 38 unit menjadi 44 unit</b>	<b>8 unit</b>		<b>83,140,000</b>
1 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan			Kantor Pertanian & Kehewanan	83,140,000
<b>URUSAN PARIWISATA</b>				
<b>Program Pengembangan Pariwisata</b>	<b>Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.072.168 menjadi 1.429.126 lama tinggal dari 2 hari menjadi 2,38 hari</b>	<b>356.958 orang dan 0.38 hari</b>		<b>3,291,078,000</b>
1 Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata			Dinas Parnsibud	1,244,900,000
2 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataaan			Dinas Parnsibud	427,210,000

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>TARGET PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>	<b>PAGU INDIKATIF</b>
3 Pembinaan Industri Kepariwisata 4 Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Kepariwisata			Dinas Parnibud Dinas Parnibud	258,977,000 1,359,991,000
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>				
<b>Program Perlindungan Konsumen &amp; Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63% menjadi 66 %</b>	<b>3%</b>		<b>112,850,000</b>
1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitas BPSK			Disperindagkop	112,850,000
<b>Program Peningkatan Perdagangan</b>	<b>Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 69% menjadi 73%</b>	<b>4%</b>		<b>1,299,229,500</b>
1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan 2 Pembuatan Ajungan Pemkot di PMPS 3 Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil 4 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan 5 Pembinaan Pedagang Kaki lima			Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop	124,319,000 201,078,000 623,360,000 165,137,500 185,335,000
<b>Program Pengembangan Pengelolaan Pasar</b>	<b>Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 82% menjadi 84%, keamanan dari 87% menjadi 89%, kebersihan &gt;30' menjadi &lt;30' )</b>	<b>2%, 2%</b>		<b>4,100,420,500</b>
1 Pembinaan dan Penataan Pedagang 2 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar 3 Peningkatan Kebersihan Pasar 4 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 5 Pemeliharaan Pasar Tersebar			Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar	44,096,000 1,422,405,000 1,139,896,000 606,712,000 887,311,500
<b>TOTAL</b>				<b>271,301,366,275</b>

### **III. KERANGKA EKONOMI MAKRO**

#### **3.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

##### **1. Perkembangan Ekonomi Daerah**

Di tengah kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif, perekonomian Kota Yogyakarta pada tahun 2005 masih mampu tumbuh sebesar 4,88% dan pada tahun 2006 sebesar 3,96%, meskipun lebih lambat dari laju pertumbuhan tahun 2004 yang tercatat 5,05% serta lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2005 yang tercatat 5,6% dan pada tahun 2006 sebesar 5,48%. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2000, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2006 tercatat Rp 4.574 milyar, lebih tinggi dari nilai PDRB tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp 4.399 milyar dan pada tahun 2004 sebesar Rp 4.195 milyar.

Secara sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2000, besarnya PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2006 didorong oleh kinerja sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar Rp 1.163 milyar, diikuti sektor Jasa-jasa sebesar Rp 982 milyar serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp 846 milyar.

Dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah serta dukungan dari masyarakat, maka pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,26% dan tingkat inflasi diperkirakan 9,44%, sehingga Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat 10,77%, sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2008 diharapkan terjadi penurunan sebesar antara 3% - 5%.

##### **a. Perkembangan PDRB Sisi Permintaan**

Kontribusi sektoral terhadap PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2006 masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,44%, diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar 21,48% dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 18,52%.

Sedangkan pada tahun 2005 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,51%, diikuti oleh sektor Jasa-jasa sebesar 21,33% dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 18,21%.

**b. Konsumsi**

Selama tahun 2005 rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta mencapai Rp 535.689,- dimana untuk konsumsi makanan selama sebulan mencapai Rp 199.232,- sedangkan non makanan mencapai Rp 336.457,-. Rata-rata pengeluaran terbesar terjadi pada sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar Rp 143.974,- atau sebesar 26,88% dari total pengeluaran.

Komposisi pengeluaran tersebut menggambarkan adanya kondisi tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk yang semakin membaik, dengan asumsi terdapat penurunan prosentase pengeluaran penduduk untuk makanan terhadap total pengeluaran, artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, maka peranan pengeluaran untuk makanan cenderung makin mengecil atau makin besar pendapatan penduduk maka konsumsi non makanan semakin meningkat.

### **3.2. Perkiraan Keuangan Daerah**

#### **1. Perkiraan Pendapatan Tahun 2008**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),



dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan dari Provinsi.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah (kabupaten/kota) dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%), pajak reklame (25%), pajak penerangan jalan (10%), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). Khusus untuk Kota Yogyakarta sesuai dengan spesifikasi daerahnya pajak galian golongan C tidak dipungut.

Adapun data realisasi Pendapatan Daerah tahun 2006 sebagaimana pada tabel 2 berikut :

Tabel 2  
Realisasi Pendapatan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2006

No.	Uraian	Tahun 2006
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>519.022.237.321,64</b>
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	96.419.456.304,52
	a. Pajak Daerah	43.997.150.025,00
	b. Restribusi	24.704.781.396,00
	c. BUMD	7.722.505.202,62
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	19.995.019.680,90
	2. Dana Perimbangan	397.150.853.946,12
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	40.145.140.985,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	316,832,000,000.00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	4,800,000,000.00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi	35.373.712.961,12
	3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	25.451.927.071,00

Sedangkan perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan 2008 sebagaimana pada tabel 3 berikut.

Tabel 3  
Perkiraan Pendapatan APBD Kota Yogyakarta TA. 2007 dan TA 2008

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2007</b>	<b>Tahun 2008</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>583.870.280.000</b>	<b>658.516.276.394</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>104.162.882.000</b>	<b>119.450.448.554</b>
Pajak Daerah	49.274.000.000	63.574.000.000
Retribusi Daerah	29.092.692.000	30.694.250.554
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.799.505.000	8.194.513.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	16.996.685.000	16.987.685.000
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>430.868.718.000</b>	<b>495.820.428.000</b>
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.038.718.000	52.325.198.000
Dana Alokasi Umum	365.042.000.000	411.257.230.000
Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000	32.238.000.000
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>48.838.680.000</b>	<b>43.245.399.840</b>
Hibah	4.988.769.000	-
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.069.791.000	41.257.799.840
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	1.987.600.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.780.120.000	-

## 2. Perkiraan Belanja Tahun 2008

Adanya perkiraan peningkatan sumber-sumber pendapatan di tahun 2008 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Yogyakarta. Namun demikian, tidak semua usulan program dan kegiatan dapat dibiayai mengingat masih adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki, oleh karenanya perkiraan belanja tahun 2008 mendasarkan pada pagu indikatif untuk setiap program sesuai urusan pemerintahan. Adapun

perkembangan belanja daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 yang disusun dengan format Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD adalah sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4  
Realisasi Belanja APBD Kota Yogyakarta Tahun 2006

<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2006</b>
<b>BELANJA</b>	<b>496.768.977.052</b>
<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>57.866.312.717</b>
1. Belanja Administrasi Umum	36.737.618.808
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	17.833.888.429
3. Belanja Modal	3.294.805.480
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>438.902.664.335</b>
1. Belanja Administrasi Umum	238.144.704.482
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	55.504.444.118
3. Belanja Modal	76.107.251.594
4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	59.411.518.162
5. Belanja Tidak Tersangka	9.734.745.979

Klasifikasi usulan program kegiatan dan pembiayaan 2007 dan 2008 merupakan usulan pembiayaan pembangunan yang dituangkan dalam format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dikategorikan sebagai Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun perkiraan belanja tahun 2007 dan 2008 sebagaimana pada tabel 5 berikut.

Tabel 5

## Perkiraan Belanja APBD Kota Yogyakarta TA. 2007 dan 2008

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2007</b>	<b>Tahun 2008</b>
<b>BELANJA</b>	<b>672.061.916.104</b>	<b>729.684.583.060</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>389.768.784.628</b>	<b>458.383.216.785</b>
Belanja Pegawai	313.551.176.304	378.194.000.222
Belanja Bunga	707.120.555	578.508.500
Belanja Subsidi	307.192.000	-
Belanja Hibah	-	17.678.947.900
Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994	45.532.030.163
Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-	-
Belanja Tidak Terduga	12.327.498.775	16.399.730.000
<b>Belanja Langsung</b>	<b>282.293.131.476</b>	<b>271.301.366.275</b>
Belanja Pegawai	79.172.400.934	84.041.385.250
Belanja Barang dan Jasa	102.454.936.051	99.750.041.621
Belanja Modal	100.665.794.491	87.509.939.404

Selanjutnya dengan memperhatikan perkiraan pendapatan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada tabel 3 dan perkiraan belanja APBD Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada tabel 5, maka perkiraan sementara RAPBD Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6  
Perkiraan RAPBD Tahun Anggaran 2008

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>658.516.276.394</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>119.450.448.554</b>
	Pajak Daerah	63.574.000.000
	Restribusi Daerah	30.694.250.554
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pisahkan	8.194.513.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.987.685.000
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>495.820.428.000</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.325.198.000
	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000
	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000

<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>43.245.399.840</b>
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya	41.257.799.840
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.987.600.000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>729.684.583.060</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>458.383.216.785</b>
	Belanja Pegawai	378.194.000.222
	Belanja Bunga	578.508.500
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	17.678.947.900
	Belanja Bantuan Sosial	45.532.030.163
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-
	Belanja Tidak Terduga	16.399.730.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>271.301.366.275</b>
	Belanja Pegawai	84.041.385.250
	Belanja Barang dan Jasa	99.750.041.621
	Belanja Modal	87.509.939.404
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(71.168.306.666)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>82.509.201.316</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	82.509.201.316
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.340.894.650</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.446.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	894.894.450
	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>71.168.306.666</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2008

Yogyakarta, 29 Januari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK PERTAMA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK KEDUA

ttd

**ARIF NOOR HARTANTO**  
KETUA

ttd

**ANDRIE SUBIANTORO**  
WAKIL KETUA

ttd

**DWI BUDI UTOMO**  
WAKIL KETUA